

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Konsep Administrasi**

Administrasi mempunyai peranan yang sangat krusial dan penting dalam semua aktivitas sebuah organisasi. Sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target/ tujuan organisasi. Baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintah pasti memiliki sistem administrasi, namun antara swasta dan pemerintah sistem administrasi nya pasti berbeda. Setiap organisasi memiliki tujuan yang hendak akan di capai kelak.

Administrasi, Administrasi Negara, Manajemen merupakan sistem yang tidak dapat di pisahkan karena merupakan suatu sistem yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Administrasi merupakan proses kegiatan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini di kemukakan oleh **Siagian, Sistem Administrasi Negara (2013:5)** , bahwa yang di maksud dengan Administrasi adalah :

“Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya”.

Antara individu yang satu dengan yang lainnya harus saling bekerjasama dengan baik. Ketika ada kerjasama antar manusia maka disitulah timbul adanya administrasi. Hal ini sesuai

dengan pendapat yang di kemukakan oleh **Herbert**, yang di kutip oleh **Siagian, Filsafat**

**Administrasi (2014:13)** yang menyatakan bahwa :

“Apabila ada dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menggulingkan sebuah batu yang tidak dapat digulingkan hanya oleh seorang diantara mereka, pada saat itu administrasi telah ada”.

**Gie** yang dikutip oleh **Syafiie** dalam bukunya yang berjudul **Sistem Administrasi**

**Negara (2013:5)** mengemukakan bahwa:

“Administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang di lakukan sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.”

Menurut **Tead** yang dikutip oleh **Handyaningrat** dalam bukunya yang berjudul

**Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen (2014:6)** mengemukakan bahwa:

“Administrasi sebagai proses dan badan yang bertanggung jawab terhadap penentuan tujuan, dimana organisasi dan manajemen di gariskan dan sebagai penentuan pengarahannya.”

Berdasarkan hasil kutipan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan administrasi harus di lakukan secara bersama – sama antara 2 orang atau lebih dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari – hari karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bias bekerja sendiri serta membutuhkan orang lain dalam pencapaian tujuannya.

## **2.2. Konsep Publik**

Pengertian public berasal dari Bahasa Inggris (public) yang berarti umum, masyarakat atau Negara. Dalam bahasa Indonesia publik di beri terjemahan praja yang berarti rakyat,

sehingga untuk pemerintah yang melayani keperluan seluruh rakyat diberi istilah pamong praja (pelayan rakyat).

Administrasi Publik di definisikan oleh **Pfiffner** dalam buku **Syafiie, Ilmu Administrasi Publik (2014:23)** menyebutkan bahwa “Administrasi Publik adalah koordinasi usaha – usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah”.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa Administrasi Publik adalah adanya kerjasama antara sekelompok orang dalam melakukan kebijakan pemerintah.

Dalam bukunya, **Syafiie, Administrasi Publik (2014:26)** mengutip pengertian Administrasi Publik menurut **Abdulrachman**, yaitu “Administrasi Publik adalah Ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik Negara”

Dalam bukunya, **Syafiie, Administrasi Publik (2014:26)** mengutip pengertian Administrasi Publik menurut **Dimock**, yaitu “Administrasi Publik adalah Kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuatan politiknya”

Jadi pada dasarnya dalam proses administrasi memiliki tujuan, proses yang di lakukan oleh sekelompok orang, kerjasama pembagian tugas dalam pencapaian tujuan bersama. Sedangkan administrasi publik adalah adanya kegiatan yang di lakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan kewajibannya terhadap masyarakat (pelayan pemerintah) secara umum. Terlihat bahwa administrasi publik adalah sebagai wadah dalam melaksanakan tujuan Negara, karena di dalamnya terdapat kegiatan, fungsi yang harus di lakukan.

Administrasi Publik di dalamnya terdapat kepegawaian, yang merupakan unsur dari aparatur Negara yang harus dapat berperilaku yang terarah, sopan, dan tentunya taat aturan yang ada, karena berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan organisasi tersebut.

### 2.3. Konsep Organisasi

Organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu organisasi dikatakan sebagai wadah kegiatan orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, yang disebut juga sebagai organisasi “statis”, karena sekedar hanya melihat dari strukturnya. Organisasi yang bersifat “Dinamis” dilihat dari pada sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan dari pada tata hubungan yang terjadi di dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal.

**Simon** yang dikutip oleh **Syafiie** dalam bukunya “**Ilmu Pemerintahan**” (2016:128) menyatakan bahwa definisi organisasi adalah : “Organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan – hubungan lain di dalam suatu kelompok orang”

Pengertian organisasi menurut **Thoha** yang dikutip oleh **Silalahi** dalam bukunya “**Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi**” (2003:124) mengemukakan bahwa:

“Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang menunjukkan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Hubungan yang berstruktur ini disebut hirarki dan konsekuensi dari hirarki ialah adanya kategori kelompok superior dengan kelompok subordinasi.”

Adapun pengertian Organisasi menurut **Weber** yang dikutip oleh **Thoha** dalam bukunya “**Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya**” (2014:113) bahwa :

“Organisasi merupakan suatu batasan-batasan tertentu (boundaries), dengan demikian seseorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.”

Sejalan dengan definisi-definisi di atas menurut **Handayani** (2014:43), menyatakan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal.
2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tapi satu sama lain saling berkaitan.
3. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya ataupun tenaganya.
4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan.
5. Adanya suatu tujuan.

#### **2.4. Pengertian Manajemen**

Pengertian manajemen dari beberapa ahli selalu berbeda, menurut **Terry** yang dikutip oleh **Syafiie** dalam bukunya **Ilmu Pemerintahan (2016:126)** adalah sebagai berikut:

“Manajemen adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya.”

Menurut pendapat **Siagian** dalam bukunya **Filsafat Administrasi (2016:127)**, mengenai pengertian manajemen adalah “Kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.”

Menurut pendapat **Hasibuan** dalam bukunya **Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah yang dikutip oleh Syafiie (2016:127)**, pengertian mengenai manajemen adalah sebagai berikut :

“Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil dan tujuan tertentu.”

Beberapa definisi tersebut, terdapat unsur-unsur manajemen yaitu :

1. Adanya manusia (Manusia sebagai pimpinan dan pelaksana)
2. Adanya tujuan yang hendak dicapai (Sebagai pegangan pengarahan)

3. Adanya wadah yakni badan organisasi dimana orang-orang bekerja
4. Adanya alat untuk mencapai tujuan
5. Kegiatan atau aktivitas seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan

## **2.5. Konsep Birokrasi**

Birokrasi Secara epistemologis berasal dari kata “bureau” yang berarti meja atau kantor dan kata “kratia” (cratin) yang berarti pemerintah. Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematisasi kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi. Istilah birokrasi sendiri diterjemahkan sebagai pemerintah yang anggota-anggotanya disebut aparat birokrasi atau birokrat. Menurut **Sedarmayanti , Manajemen Sumber Daya Manusia (2009: 67)** birokrasi merupakan “Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Birokrasi menurut **Weber, Teori Perilaku Organisasi (2012:45)** merupakan “Suatu organisasi besar yang memiliki otoritas legal rasional, legitimasi, ada pembagian kerja dan bersifat imperasional”.

Jadi, dapat di artikan bahwa birokrasi merupakan lembaga pemerintah yang memiliki otoritas legal, legitimasi dan memiliki operasional pembagian kerja yang bersifat imperasional di jalankan oleh pegawai negeri yang d atur di dalam Undang – undang.

Konsep Dasar Birokrasi tidak bisa lepas dari konsep yang digagas **Weber, Teori Perilaku Organisasi (2012:64)**, sosiolog ternama asal Jerman dalam karyanya yang dikenal melalui ideal-type (tipe ideal) birokrasi modern yaitu :

1. Rational-legal authority (Otoritas Legal Rasional) yaitu otoritas dimana legitimasi yang didasarkan pada keyakinan akan alat hukum yang diciptakan secara rasional dan juga pada kewenangan seseorang yang melaksanakan tata hukum sesuai prosedur.
2. Traditonal authotiy (Otoritas Tradisional) yaitu otoritas dimana sebuah legitimasi yang bertumpu pada kepercayaan dan rasa hormat pada tradisi dan masing-masing pengembangan tradisi.
3. Charismatic type (Otoritas Kharismatik) yaitu otoritas dimana legitimasi dilandaskan kepada charisma yang dimiliki oleh seorang pemimpin sehingga ia dihormati dan dikagumi oleh pengikutnya.

## 2.6. Konsep Peran

**Robert, Dunia Sosiologi dan Antropologi, (2013:44)** seorang antropolog mengemukakan bahwa

“Peran adalah penggambaran interaksi sosial dalam terminology, aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang di tetapkan oleh budaya yang ada.”

Peran dapat di jalankan oleh semua makhluk hidup karena peran berkaitan langsung dengan tingkah polah yang di lakukan, biasanya peran berkembang sesuai dengan budaya yang ada sebelumnya.

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (**Soekanto, Sosiologi Pemerintahan, 2004:243**). Peran menurut **Soekanto, Sosiologi Pemerintahan 2004:244** dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Konsep tentang peran (role) menurut **Komarudin (1994:768)** dalam buku yang berjudul **Ensiklopedia Manajemen** adalah:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. **Parwoto (dalam Soehendy, 2001:28)** mengemukakan bahwa **peran serta mempunyai ciri-ciri** :

1. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan.
2. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
3. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).
4. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
5. Peran masyarakat : sebagai subyek.
6. Struktur Peran dibagi menjadi dua yaitu :
  - a. Peran Formal (Peran yang Nampak jelas) yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.
  - b. Peran Informal (Peran tertutup) yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

## 2.7. Konsep Pemerintah

Berbicara mengenai pemerintah maka akan berbicara mengenai tugas dan wewenang.

Pemerintah merupakan elemen dari struktural politik / masyarakat. Dalam penyelenggaraan

dan melaksanakan tujuan negara, terdapat pemerintah yang menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam suatu negara. Menurut **Strong** Pemerintah memiliki dua pengertian yaitu :

- a. Pemerintah dalam arti luas (*regering*)  
Yaitu pelaksana tugas seluruh badan-badan, lembaga dan petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara. Contohnya pelaksanaan dari fungsi badan legislative, eksekutif dan yudikatif baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- b. Pemerintah dalam arti sempit (*bestuur*)  
Yaitu mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Contohnya dalam pelaksanaan eksekutif, yaitu pelaksanaan dari pengaturan perundang – undangan Negara.

Menurut **Apter** yang dikutip oleh **Kencana** dalam buku **Pengantar Ilmu Pemerintahan (2001:23)** berpendapat bahwa:

“Pemerintah adalah merupakan suatu anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan system yang mencakupnya itu adalah monopoli praktisi mengenai kekuasaan paksaan”

Menurut **Sayre** yang di kutip **Situmorang** dalam buku **Dasar - Dasar Hukum Administrasi Negara (2005:20)**, menyebutkan:

“Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu Negara/Badan tertinggi yang memerintah sesuatu Negara seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Pemerintah yakni kata nama subyek yang berdiri sendiri”

**Affandi** dalam bukunya **Ilmu – Ilmu Kenegaraan suatu Studi Perbandingan (1982:203)** pemerintah adalah:

“Pemerintah dikatan lembaga atau badannya, yaitu organ Negara yang melakukan pemerintahan, sedangkan pemerintahan diartikan sebagai pelaksanaan tugasnya, fungsinya, atau aktivitasnya yang dilakukan oleh pemerintah”

**Poerwadarminta, Hukum Pemerintahan Daerah (2017:93)** pemerintah adalah “Kekuasaan memerintah suatu Negara (daerah Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara.”

Pemerintah dapat disimpulkan sebagai segala hal baik berupa perbuatan, urusan, kegiatan, dan sebagainya yang memerintah atau pemerintahan merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat terlepas dari sebuah system. Karena system dan pemerintahan selalu berjalan seiringan untuk mencapai tujuan tertentu.

## **2.8. Konsep Peran pemerintah**

Peran pemerintah adalah suatu kegiatan atau perilaku yang di lakukan oleh sebuah organisasi guna mencapai tujuan bersama. Fungsi peran pemerintah yaitu mengarahkan masyarakat kedalam kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta di bebaskan oleh masyarakat.

Menurut **Labolo** dalam buku yang berjudul **Memahami Ilmu Pemerintahan suatu Kajian Teori, Konsep dan pengembangannya (2010:32)** menyebutkan bahwa peran pemerintah diartikan sebagai “Ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah sebagai unit kerja pulik memenuhi dan melindungi tuntutan masyarakat yang di perintah”

**Labolo** juga dalam bukunya yang berjudul **Memahami Ilmu Pemerintahan suatu Kajian Teori, Konsep dan pengembangannya (2010:32)** menyebutkan bahwa peran pemerintah dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Peran pemerintah sebagai regulator  
Menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan – peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan

acuan dasar kepada masyarakat sebagai segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan

- b. Peran pemerintah sebagai dinamistator.  
Menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan dalam pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.
- c. Pemerintah sebagai fasilitator.  
Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta bidang pendanaan atau permodalan melalui bantuan modal kepada masyarakat yang di berdayakan.

**Labolo** juga dalam buku yang berjudul **Memahami Ilmu Pemerintahan (2010:32)**

membagi fungsi dari peran pemerintah menjadi:

- a. pelayanan (public service)
- b. pembangunan (development)
- c. pemberdayaan (empowering)
- d. pengaturan (regulation)

Menurut **Haryanto** dalam buku kutipan **Aini Nurul (2001 : 36-37)** menguraikan bahwa

secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yaitu:

- a. Fungsi Pengaturan  
Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Pemerintah daerah mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Peraturan Daerah (Perda) dibuat bersama DPRD dengan eksekutif.
- b. Fungsi Pelayanan.  
Kewenangan pemerintah daerah terletak pada urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan dan peradilan antar daerahnya. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (Public service) dan pelayanan sipil (Civil service) yang menghargai kesetaraan.
- c. Fungsi Pemberdayaan.

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah

Menurut **Mondong, (2011:8)** peran pemerintah dalam meningkatkan prestasi olahraga

yaitu:

1. Sebagai dinamisator  
Yaitu pemerintah harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dan mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan.
2. Sebagai katalisator  
Yaitu berkaitan dengan aparatur pemerintah dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan.
3. Sebagai Pelopor  
Yaitu sebagai aparatur pemerintah yang memiliki kewibawaan tinggi, maka pemerintah harus dapat mengayomi masyarakat, memberikan contoh yang baik, memiliki dedikasi (loyalitas) yang tinggi, serta dapat memberikan penampilan yang baik pula terhadap masyarakat agar pemerintah dapat dihargai dan dihormati serta disegani oleh masyarakat.

## 2.9. Konsep Prestasi

Prestasi menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 :895)** adalah “Hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan dan sebagainya.”

**Sumadi (2006: 6)**, mengemukakan bahwa Prestasi merupakan “Hasil evaluasi pendidikan yang dicapai oleh siswa/atlit setelah menjalani proses pendidikan secara formal dalam jangka waktu tertentu”.

Menurut **Muhibbin Syah (2007:213)** menyebutkan bahwa:

“Prestasi adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program atau proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seorang siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.”

Jadi, prestasi dapat di artikan sebagai hasil dari proses pembelajaran yang telah dilakukan, baik pembelajaran secara formal maupun non formal. Prestasi dapat tercapai apabila seseorang belajar secara bersungguh – sungguh dan tekun.

## **2.10. Konsep Olahraga**

Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan fisik yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Dalam olahraga tidak hanya melibatkan sistem muskuloskeletal semata, namun juga mengikutsertakan sistem lain seperti sistem kardiovaskular, sistem respirasi, sistem ekskresi, sistem saraf dan masih banyak lagi. Pemahaman tentang konsep olahraga dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Istilah sport berasal dari bahasa latin “disportare” atau “deporate” didalam bahasa italia menjadi “diporate” yang artinya menyenangkan, pemeliharaan atau menghibur untuk bergembira. Istilah olahraga berubah sepanjang waktu namun mempunyai pengertian yang sama yaitu esensi pengertiannya kebanyakan berkaitan dengan tiga unsur pokok yaitu bermain, latihan fisik dan kompetisi.

**UNESCO** mendefinisikan tentang sport yaitu “setiap aktifitas fisik berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur dan orang lain ataupun diri sendiri”.

**Giriwijoyo (2012:2)** juga mendefinisikan bahwa:

“Olahraga adalah kagiatan dalam perikehidupan yang tidak hanya melibatkan aspek jasmani, tetapi juga aspek rohani, aspek sosial dan bahkan aspek ekonomi”.

Dapat di tarik kesimpulan bahwa olahraga dalam kegiatan kehidupan tidak hanya mengenai jasmani namun dapat juga berupa rohani atau kejiwaan. Dalam hal ini setiap orang pasti memerlukan kegiatan olahraga karna tubuh memerlukan ketahanan yang baik.

**Mutohir dan Maksun (2007:14)** menjelaskan bahwa olahraga adalah:

“Proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan/pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa olahraga adalah suatu kegiatan yang di lakukan agar dapat membina potensi jasmani dan rohani seseorang baik dalam bentuk permainan maupun perlombaan agar dapat membentuk manusia dan kehidupan – kehidupan yang lebih sehat tanpa penyakit.

**International Council of Sport and Physical Education (ICSPE)** juga mengartikan bahwa:

“olahraga merupakan setiap aktivitas jasmani yang mengandung sifat/ciri permainan dan melibatkan unsur perjuangan menentang diri sendiri, orang lain atau konfrontasi dengan faktor alam”.

Secara umum olahraga menurut hakekatnya merupakan salah satu aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan yang melibatkan gerak tubuh berulang-ulang seseorang.

Olahraga juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud adalah adanya aturan-aturan yang harus dipatuhi, baik itu dalam olahraga yang bersifat play (bermain), games maupun sport. Aturan dalam olahraga bersifat tidak terlalu ketat karena play merupakan aktivitas fisik yang bersifat sukarela dan dilakukan secara bebas. Olahraga yang bersifat games aturannya sudah mulai ketat. Didalam olahraga aturan yang telah dibuat bukan merupakan suatu hal yang dapat menghambat pengembangan kemampuan dalam berekspresi atau juga bukan merupakan pengekang kebebasan, melainkan suatu bentuk tindakan untuk menjadikan olahraga itu menjadi lebih baik, penuh dengan seni dan etika. Olahraga adalah gerak yang merupakan kebutuhan hakiki bagi manusia.

Dari beberapa pendapat para ahli olahraga diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan olahraga adalah :

1. Kegiatan fisik yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok masyarakat atau regu.
2. Kegiatan fisik yang dilakukan dengan cara bersenang-senang dalam ruang waktu bercakap-cakap, hiburan, senda gurau, dan permainan.
3. Kegiatan aktivitas yang dilakukan setiap hari.
4. Kegiatan ketangkasan fisik yang terdapat dalam ketrampilan gerak.
5. Kegiatan aktivitas yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kesegaran jasmani, rohani dan sosial.
6. Kegiatan aktivitas yang ada unsur bermain, peraturan, bertanding, dan juara.
7. Pembentukan karakter seseorang serta peningkatan prestasi puncak.
8. Kegiatan aktivitas yang memerlukan perjuangan serta dapat mengendalikan diri dan orang lain.

